

Peran Nasional Rusia Terhadap Konflik Suriah (2015-2020)

Riezky Poetra Phoenna, Chandra Purnama, Windy Dermawan
Riezkyoetra90@gmail.com
*Program Magister Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran
Bandung, Indonesia*

Abstrack

The ongoing conflict in Syria has led Russia to become more deeply involved in supporting the regime of Bashar Al-Assad. Russia has been the main supporter of the Assad regime since the beginning of the conflict. Russia's participation in the Syrian conflict has prevented Assad from the threat of regime collapse. This research aims to recognize the Russia's national role conceptions in the Syrian conflict. In analyzing, the researcher uses Kalevi J. Holsti's national role conceptions to identify the Russia's national roles. The method used in this research is descriptive qualitative. This research indicates that Russia has the role of faithful ally in the Syrian conflict. It was identified through the decisions, commitments, rules and actions implemented by Russia during the Syrian conflict. Russia's general policy behavior indicates that the historical relationship between the two nations is an important part of Russia's foreign policy. As a faithful ally, Russia has considered Syria as one of its foreign policy concerns, especially in the Middle East.

Keywords: *Russia, Syrian Conflict, National Role Conceptions, Foreign Policy, Faithful Ally*

Abstrak

Konflik berkepanjangan yang terjadi di Suriah telah mendorong Rusia untuk terlibat lebih jauh dalam mendukung eksistensi rezim Bashar Al-Assad. Sejak mulai pecahnya konflik, Rusia telah menjadi pendukung utama dari rezim Assad. Partisipasi aktif Rusia dalam konflik Suriah telah menghindarkan Assad dari ancaman kejatuhan rezim. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi konsepsi peran nasional Rusia dalam keterlibatannya terhadap konflik di Suriah. Dalam menganalisis, peneliti menggunakan konsepsi peran nasional Kalevi J. Holsti untuk mengidentifikasi tipe peran nasional yang dijalankan Rusia. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Penelitian ini menunjukkan bahwa konsepsi peran nasional yang dijalankan oleh Rusia terhadap konflik di Suriah adalah konsepsi peran nasional dengan tipe sekutu setia. Hal ini teridentifikasi dari keputusan, komitmen, aturan dan tindakan yang dijalankan oleh Rusia selama konflik Suriah berlangsung. Perilaku Rusia secara umum menunjukkan bahwa sejarah panjang hubungan kedua negara tidak dapat dilepaskan dari kebijakan luar negeri Rusia. Sebagai sekutu setia Rusia menjadikan Suriah salah satu pertimbangan dalam menjalankan kebijakan luar negerinya, khususnya di kawasan Timur-Tengah.

Kata Kunci: Rusia, Konflik Suriah, Konsepsi Peran Nasional, Kebijakan Luar Negeri, Sekutu Setia

1. PENDAHULUAN

Fenomena “*Arab Spring*” yang melanda Timur-Tengah sejak tahun 2010 membuat sejumlah negara di dalamnya bergejolak, tak terkecuali Suriah. Fenomena tersebut menyeret Suriah ke dalam situasi konflik yang cukup rumit. Konflik diakibatkan oleh reaksi

keras pemerintah atas protes dan tuntutan sebagian masyarakat Suriah yang tidak puas terhadap rezim otoriter Bashar Al-Assad. Pada akhirnya reaksi tersebut memicu konflik diantara pihak Assad dan kelompok oposisi. Pertikaian tersebut memicu reaksi pro dan kontra dari sejumlah negara.

Sebagai negara yang memiliki sejarah panjang dalam hubungannya dengan Suriah, Rusia telah menjadi pendukung utama rezim Assad. Sebagaimana yang diketahui bahwa Suriah merupakan mitra tradisional Rusia yang telah dibangun sejak masa Uni Soviet eksis. Namun sejak Uni Soviet runtuh hubungan keduanya jatuh ke titik terendah sebagai akibat dari keterpurukan Rusia dalam bidang ekonomi. Kendati demikian dinamika regional dan global berhasil membentuk serta memperbaharui hubungan kedua negara. Kepemimpinan Vladimir Putin telah membuat hubungan Rusia-Suriah kembali kepada romantisme masa lalu (Kreutz, 2010).

Konflik Suriah membuat Rusia menghadapi situasi yang sangat rumit di tengah hangatannya hubungan kedua negara. Namun berkaca dari peristiwa yang terjadi terhadap lengsernya Muammar Khadafi di Libya, Rusia berupaya untuk tidak membiarkan hal tersebut terjadi di Suriah. Sikap tersebut mendorong Rusia untuk ikut berhadapan langsung dengan pihak-pihak kontra Assad. Sejumlah aktor-aktor global seperti Amerika Serikat, Inggris, Prancis, hingga aktor regional seperti Turki dan Arab Saudi menjadi pihak kontra yang menginginkan Assad lengser (Bartz, 2016).

Sejak awal pecahnya konflik, Rusia konsisten menempuh berbagai langkah-langkah diplomatik demi tercapainya solusi damai. Dalam praktiknya, Rusia harus menemukan kesepakatan penting terkait konflik Suriah. Namun meski begitu, solusi diplomatik tak kunjung dicapai Rusia. Hal tersebut sebagian besar dipengaruhi oleh perbedaan sikap antara Rusia dan pihak-pihak kontra Assad. Rusia menginginkan penyelesaian konflik yang terjadi diselesaikan oleh pihak internal Suriah tanpa adanya intervensi asing. Sementara pihak kontra berupaya untuk terus menekan Assad agar segera lengser dari posisinya sebagai presiden Suriah (Lund, 2019).

Hingga tahun 2014, Rusia telah menggunakan hak vetonya di Dewan keamanan untuk mencegah berbagai kemungkinan draft resolusi yang berpotensi mengancam posisi Assad. Selain itu upaya diplomatik juga dilakukan Rusia melalui konferensi Jenewa yang melibatkan pihak pro dan kontra. Namun pada akhirnya berbagai upaya diplomasi yang dilakukan Rusia tidak memiliki dampak yang nyata terhadap situasi di Suriah. Pada akhirnya konflik semakin tidak terkendali dan membuat Assad harus kehilangan kontrol atas sebagian wilayah Suriah.

Rusia memandang hal tersebut sebagai ancaman yang dapat meruntuhkan rezim Assad dari kedudukannya di Suriah. Oleh karena itu atas dasar permintaan resmi serta saran dari Iran, pada bulan September 2015 Rusia segera mengerahkan kekuatan militernya di Suriah. Strategi militer Rusia di Suriah lebih difokuskan terhadap kekuatan udara. Sementara pasukan loyalis, milisi Syi'ah dukungannya Iran dan tentara Suriah membantu Rusia lewat kekuatan darat. Upaya militer merupakan langkah paralel Rusia ditengah kegagalan mencapai kesepakatan (Hamilton et al., 2020).

Pasca pengerahan kekuatan militernya di Suriah, Rusia telah membalikkan keadaan yang memberikan keuntungan terhadap rezim Assad. Rusia telah membantu Assad melewati masa-masa yang menentukan terhadap ancaman pelengseran. Tidak hanya itu, kekuatan militer Rusia telah membantu tentara Suriah untuk merebut kembali wilayah-wilayah yang dikuasai oposisi. Dengan berubahnya peta konflik pasca penggunaan kekuatan militer, Rusia segera menghidupkan kembali perundingan damai yang melibatkan aktor-aktor regional seperti Turki dan Iran.

2. KERANGKA ANALISIS

Konsep yang digunakan dalam tulisan ini adalah Konsepsi Peran Nasional (National Roles Conceptions) dari Kalevi J. Holsti. Konsepsi Peran Nasional merupakan salah satu *output* dari kebijakan luar negeri yang berhubungan dengan aktor-aktor negara yang terlibat permasalahan di suatu sistem maupun kawasan. Konsepsi peran nasional yang ditawarkan Holsti dapat digunakan untuk menganalisis kebijakan luar negeri suatu negara. Hal ini dikarenakan konsepsi peran nasional memiliki kemampuan untuk memahami perilaku kelompok yang terlibat dalam pengambilan keputusan. Selain itu konsepsi peran nasional merupakan sebuah konsep kunci yang dapat menghubungkan perilaku individu dalam berbagai level analisis. Holsti mendefinisikan konsepsi peran nasional sebagai persepsi pembuat kebijakan luar negeri tentang posisi negara mereka dalam sistem internasional. Persepsi mereka termasuk tentang jenis umum keputusan, aturan, komitmen, tindakan yang sesuai dengan mereka dan fungsi (jika ada) terkait dengan posisi internasional. Konsepsi peran nasional memberikan norma, pedoman, dan standar yang mempengaruhi banyak aspek pengambilan keputusan (Wish, 1980).

Pada umumnya terdapat 16 tipe peran nasional, diantaranya yaitu : Kubu pembebas-revolusioner, Pemimpin Regional, Pelindung Regional, Bebas-aktif, Pendukung Kebebasan, Agen anti imperialis, Pembela keyakinan, Mediator-Integrator, Kolaborator sub sistem regional, Pembangunan (*"Developer"*), Perantara sementara (*"Bridge"*), Sekutu setia (*"Faithful Ally"*), Bebas (*"Independent"*), Meneladani (*"Example"*), Pembangunan dalam negeri (*"Internal Development"*), Konsepsi-konsepsi peran lainnya yang berhubungan dengan pengimbang (*Balancer*). Masing-masing ke 16 tipe tersebut akan mencerminkan tingkat keterlibatan yang tinggi dan rendah dari suatu negara (Holsti, 1970).

Setiap negara dapat mengasumsikan tipe peran nasional tertentu terhadap negara mereka. Lokasi, letak geografis, sumber daya alam, ekonomi, sejarah, budaya, agama, ideologi hingga kepribadian elit penguasa merupakan alasan-alasan umum dalam mengasumsikan setiap tipe peran nasional. Namun menurut Holsti tidak ada jaminan pasti bahwa alasan-alasan tersebut akan menghasilkan suatu tipe peran nasional. Misalnya saja letak geografis sebuah negara tidak akan serta-merta dapat menghasilkan konsepsi peran tertentu (Holsti, 1987).

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan paradigma deskriptif. Melalui pendekatan kualitatif, peneliti akan mendeskripsikan fenomena perilaku serta tindakan Rusia terhadap konflik di Suriah. Adapun data-data yang didapatkan dalam penelitian ini adalah hasil dari wawancara dan studi literatur. Peneliti melakukan wawancara dengan salah satu akademisi di bidang kebijakan luar negeri Rusia. Sementara studi literatur diperoleh dari berbagai artikel jurnal, situs resmi, media daring dan internet yang peneliti anggap kredibel.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Rusia, Suriah Dan Perang Sipil

Konflik yang melanda Suriah bermula dari protes-protes kecil terhadap pemerintah. Protes tersebut merupakan rentetan dari peristiwa *"Arab Spring"* yang dimotivasi oleh peristiwa lainnya, seperti peristiwa di Tunisia dan Mesir. Protes yang dilakukan oleh demonstran awalnya hanya berskala kecil. Namun setelah direspon dengan keras oleh pemerintah, gelombang demonstrasi menjadi semakin besar. Respon keras tersebut kemudian memicu amarah dari kelompok oposisi. Pada akhirnya demonstrasi yang bermula protes kecil menjadi konflik bersenjata antara pihak oposisi dengan pemerintahan

Bashar Al-Assad. Pada tahun 2012 konflik bersenjata semakin menyebar ke berbagai wilayah Suriah. Hal tersebut disinyalir sebagai akibat dari dukungan pihak-pihak asing terhadap kelompok oposisi yang juga menginginkan Assad lengser. Keterlibatan pihak-pihak asing di Suriah membuat kelompok oposisi semakin kuat. Alhasil pada saat yang sama, Assad mulai kehilangan kontrol terhadap sejumlah wilayah yang dikuasai oleh kelompok oposisi (Lund, 2019).

Akibat dari konflik bersenjata yang semakin melebar di wilayah Suriah, ribuan masyarakat Suriah terpaksa harus meninggalkan kediaman mereka selama konflik. Mereka meninggalkan kampung halaman dalam waktu yang tidak menentu, jika melihat penyelesaian konflik yang tidak menemui titik terang. Pemandangan yang dipenuhi oleh tenda-tenda putih menjadi pemandangan baru yang terlihat di wilayah-wilayah perbatasan Yordania. Kaum perempuan, lansia hingga anak-anak mengalami hal yang tidak menentu. Mereka hanya bisa duduk dan berjalan di kamp pengungsian sembari menanti konflik reda dan berharap dapat kembali ke kediaman mereka secepatnya. Permasalahan yang dialami oleh pengungsi adalah keterbatasan tempat hingga logistik. UNHCR memfasilitasi bangunan hanya untuk para pengungsi yang benar-benar lemah saja. Sedangkan yang dianggap sehat hanya diberi bantuan seperti selimut, pemanas dalam tenda dan beberapa peralatan lainnya. Pengungsi dari Suriah tidak hanya ke wilayah Yordania saja melainkan juga ke Libya, Libanon, Turki hingga ke Eropa (Sulaeman, 2013).

Konflik Suriah melibatkan banyak aktor berkepentingan didalamnya. Menurut Pillon (2014) bahwa aktor-aktor dalam konflik Suriah meliputi aktor utama dan aktor eksternal. Aktor utama adalah pemerintahan Assad sendiri kemudian diikuti oleh kelompok-kelompok besar dari oposisi yang meliputi *Syrian National Coalition* (SNC), kelompok Kurdi, hingga *Free Syrian Army* (FSA). Selain itu terdapat kelompok teroris besar seperti *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) yang termasuk kedalam kelompok oposisi (Pillon, 2014).

Selain aktor-aktor internal Suriah, aktor eksternal juga ikut berpartisipasi. Aktor-aktor eksternal terdiri dari negara-negara yang mendukung dan menginginkan Assad lengser. Rusia, Cina dan Iran merupakan negara yang secara terang-terangan mendukung Suriah. Namun jika dibandingkan dengan Rusia dan Iran, Cina aktif mendukung Suriah dalam forum Dewan Keamanan PBB. Selain hal tersebut dapat dikatakan partisipasi Cina tidak lebih besar dibandingkan Rusia dan Iran di Suriah. Pihak-pihak yang berseberangan adalah Amerika Serikat, Arab Saudi, Qatar, Israel, Perancis, dan Inggris. Amerika Serikat serta koalisi secara gamblang menginginkan rezim Assad untuk segera tumbang. Aktor eksternal lainnya dalam konflik Suriah adalah Turki. Turki berambisi untuk mendapatkan pengaruh regional lewat intervensi konflik Suriah. Selain itu persoalan wilayah dengan kelompok Kurdi, membuat Erdogan mengambil keputusan untuk terlibat dalam konflik Suriah (Pillon, 2014).

Sejatinya sejak awal pecahnya konflik pada tahun 2011, Rusia telah berupaya untuk memberikan dukungan diplomatik terhadap Suriah. Berkali-kali Rusia menekankan bahwa langkah-langkah diplomatik harus dilakukan oleh otoritas Suriah tanpa adanya intervensi dari pihak-pihak asing yang berkepentingan. Pada saat itu Dmitri Medvedev yang menjadi presiden Rusia melobi Assad untuk segera melakukan reformasi struktural serta menenangkan demonstran untuk menghindari reaksi internasional. Rusia menekankan masyarakat internasional untuk memberi waktu kepada pemerintahan Assad untuk menyelesaikan kekacauan yang terjadi (Lund, 2019).

Dalam rangka menghindarkan Suriah dari skenario Libya, Rusia kerap menggunakan posisinya sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB untuk melakukan veto terhadap draft resolusi yang berpotensi melengserkan Assad dari posisinya. Hingga 2014 Rusia bersama Cina telah melakukan sebanyak empat veto yang berpotensi melengserkan Assad. Bagi Rusia prinsip-prinsip non-intervensi harus dijunjung dalam

sistem internasional. Rusia menegaskan bahwa setiap draft resolusi DK PBB yang diajukan AS akan berpotensi melanggar kedaulatan Suriah (Fatmawati, 2020).

Selain bertarung di arena diplomatik, Rusia juga mendukung Suriah melalui militer. Adapun bantuan militer yang dilakukan Rusia berupa persenjataan. Meski ditentang oleh sejumlah negara Teluk dan Barat, Rusia menegaskan bahwa persenjataan yang dipasok terhadap Suriah merupakan kewajiban Rusia dalam memenuhi kontrak penjualan senjata yang telah dimulai sebelum konflik terjadi (Fatmawati, 2020). Sebagaimana yang diketahui bahwa sejak tahun 2009-2013 Rusia telah menyumbang sekitar 85% persenjataan Suriah. Dalam periode tersebut Rusia telah melakukan pengiriman 8 sistem pertahanan udara BUK-M2E dan 33 sistem pertahanan udara Pantsir-S1 (Kuimova, 2019).

Konflik Suriah menjadi sangat rumit karena melibatkan berbagai aktor dengan pandangan pro dan kontra di dalamnya. Sehingga upaya Rusia di jalur diplomasi tidak membuahkan hasil terhadap jalannya progres perdamaian di Suriah. Alhasil kelompok oposisi semakin terus menguasai sebagian wilayah Suriah. Sementara pihak Assad mulai kehilangan kontrol atas sebagian wilayahnya. Terlebih perkembangan kelompok teroris di antara kelompok oposisi yang semakin cepat. Misalnya saja kelompok ISIS yang mampu mengumpulkan ribuan pasukan dari berbagai negara menambah beban terhadap rezim Assad (Pillon, 2014).

Semakin menurunnya kontrol rezim Assad atas wilayah Suriah, Rusia menyadari bahwa momen tersebut merupakan situasi kritis yang berpotensi menjatuhkan Assad dari posisinya. Pada akhirnya di bulan September 2015, Rusia mulai mengerahkan pasukan militernya langsung ke Suriah. Fokus utama Rusia dalam operasi militernya di Suriah adalah terhadap kekuatan udara. Sementara pasukan loyalis, milisi Syi'ah dukungan Iran dan tentara Suriah melengkapi operasi militer di daratan. Meski operasi militer Rusia kerap dikritik sebagai akibat dari sasaran jet-jet Rusia terhadap kelompok oposisi, namun tindakan militer Rusia terbukti efektif dalam merebut kembali wilayah-wilayah Suriah dari kelompok oposisi (Lund, 2019).

Secara umum operasi militer Rusia telah menyelamatkan rezim Assad dari ancaman pengalihan. Situasi tersebut dimanfaatkan Rusia untuk melanjutkan perundingan atas inisiatif Rusia. Rusia berhasil memaksa pihak oposisi untuk duduk di meja perundingan dalam meraih solusi damai. Meski begitu Rusia belum sepenuhnya dapat menjamin penguasaan kembali seluruh wilayah Suriah dari pihak oposisi. Hal ini dikarenakan tingkat kerumitan yang cukup tinggi di beberapa wilayah. Beberapa kelompok oposisi yang didukung Turki dan AS membuat Rusia harus bertindak dengan hati-hati untuk menghindari konfrontasi langsung dengan aktor-aktor tersebut (Şen, 2020).

B. Peran Nasional Rusia Dalam Konflik Suriah

Rumitnya situasi di Suriah menuntut Rusia untuk bekerja keras dalam mempertahankan dukungannya terhadap Assad. Baik atau buruknya kebijakan yang diambil Rusia telah memutuskan untuk mempertahankan hubungan strategis dengan Suriah. Sebagai sekutu setia, Rusia tetap konsisten dengan pendiriannya meskipun harus berhadapan dengan aktor-aktor lainnya yang terlibat. Dalam rangka menelaah tipe peran nasional yang dijalankan oleh Rusia, maka penting untuk diuraikan lebih jauh tentang keputusan, komitmen, aturan dan tindakan yang menjadi pedoman serta standar dalam menentukan tipe peran yang diambil.

1. Keputusan Rusia Terhadap Konflik Suriah

Sejak awal pecahnya konflik, Rusia telah memutuskan untuk menempuh upaya diplomasi tanpa campur tangan pihak asing. Rusia menyadari betul bahwa tuntutan pengalihan rezim Assad sebagai akibat dari ketidakpuasan masyarakat atas

kekuasaannya yang telah berjalan lebih dari 40 tahun. Kedekatan Rusia dengan rezim Assad di Suriah, mendorong Rusia untuk melobi Assad agar segera melakukan reformasi serta meredakan situasi. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari reaksi internasional. Rusia berjuang keras di arena diplomatik dengan Amerika Serikat, PBB, organisasi regional hingga aktor-aktor internasional lainnya untuk menemukan formula yang tepat dalam mencapai perdamaian (Lund, 2019).

Diplomasi yang intens dilakukan Rusia merupakan upaya untuk mencegah peristiwa Libya terulang di Suriah. Sejak awal Rusia menyadari bahwa ada skenario sama yang ingin diulang oleh kekuatan Barat. Rusia mengklaim Barat terus memainkan pola-pola yang sama layaknya peristiwa di Libya yang berhasil menggulingkan Muammar Khadafi lewat intervensi militer AS dan NATO. Menurut Rusia, terdapat upaya untuk membentuk propaganda dalam mendorong reaksi internasional terhadap rezim Assad. Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov mengungkapkan bahwa sejumlah corong propaganda Barat akan menerbitkan laporan bias yang menggambarkan citra buruk rezim Assad. Hal tersebut upaya untuk mendorong reaksi keras serta legitimasi untuk menggulingkan rezim berkuasa (Bagdonas, 2012).

Seiring berjalannya waktu Konflik semakin meluas. Pada awalnya Rusia yakin dengan upaya diplomasinya terutama dengan keputusan Assad untuk melakukan berbagai langkah yang dapat meredakan ketegangan. Namun kelompok oposisi tetap bersikukuh untuk menggulingkan Assad. Terlebih dukungan pihak-pihak asing terhadap kelompok oposisi semakin meningkatkan kekuatan mereka untuk melawan rezim berkuasa. Pada akhirnya tahap diplomasi awal tidak membuahkan hasil apapun (Bagdonas, 2012).

Keputusan untuk menjadi penjamin atas dugaan penggunaan senjata kimia oleh rezim Assad, membuat posisi Rusia sebagai mediator semakin kuat. Dugaan penggunaan senjata kimia dalam konflik Suriah memicu reaksi keras AS. Bahkan Obama pada saat itu berniat untuk segera melakukan upaya militer terhadap rezim Assad. Pada akhirnya keputusan Rusia untuk menjadi penjamin, menghasilkan kesepakatan bersama Rusia-AS untuk melakukan pelucutan senjata kimia milik rezim Assad di bawah pengawasan Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) dan PBB. Kesepakatan bersama tersebut memiliki dampak positif bagi Rusia. Selain menghindarkan sekutu dekatnya dari ancaman pelengseran, posisi Rusia sebagai mediator setara dengan AS dalam mengelola krisis Suriah (Notte, 2020).

Setelah kesepakatan senjata kimia, Rusia kemudian memanfaatkan hal tersebut untuk tetap melanjutkan perundingan damai melalui proses Jenewa II. Namun upaya diplomasi tersebut tidak menghasilkan kesepakatan apapun. Terlebih dengan memburuknya hubungan Rusia-AS atas tindakan anekasasi Rusia terhadap Krimea, maka kesepakatan mustahil dapat dicapai. Pada akhirnya situasi yang tidak lagi terkontrol mendorong Rusia untuk menempuh jalur militer demi melindungi Assad dari ancaman pelengseran. Rusia memutuskan untuk mengerahkan kekuatannya langsung di Suriah. Keputusan tersebut dilakukan atas pertimbangan situasi yang tidak lagi terkontrol. Rusia menyadari bahwa upaya diplomasi akan sulit dilakukan jika kekuatan oposisi semakin bertambah. Oleh karena itu kesepakatan akan mudah dicapai jika kelompok-kelompok oposisi dapat dikontrol (Issaev, 2018).

2. Komitmen Rusia Terhadap Konflik Suriah

Sejak awal kekacauan terjadi, Rusia telah menegaskan komitmennya untuk melindungi posisi Bashar Al-Assad di Suriah. Rusia menilai bahwa tidak ada jaminan pengganti Assad akan memiliki sikap dan kebijakan yang sama dengan klan Assad terhadap Rusia. Oleh karena itu, Rusia akan menempuh berbagai upaya untuk

mempertahankan posisi Assad. Komitmen tersebut mendorong Rusia untuk berhadapan langsung dengan pihak-pihak yang berseberangan dengan Assad.

Sejatinya kedekatan Rusia dengan rezim Assad bukanlah sesuatu yang baru. Sejak masa Uni Soviet, pendahulu Bashar yakni Hafez Al-Assad telah memiliki hubungan erat dengan Uni Soviet. Selain karena kepentingan strategis Rusia melalui hubungannya dengan Suriah, Rusia juga mewaris pangkalan militernya di pelabuhan Tartus. Pelabuhan Tartus telah menjadi warisan berharga bagi Rusia. Jika posisi Assad terancam, maka tidak ada jaminan bahwa warisan tersebut dapat dipertahankan dengan baik oleh Rusia (Oligie, 2019).

Sebagai sekutu tradisional, Suriah telah menjadi mitra strategis Rusia di bawah keluarga Assad. Meski keduanya pernah melewati titik terendah sebagai akibat dari jatuhnya Uni Soviet, namun hal tersebut tidak bertahan dalam waktu lama. Hubungan kedua negara dibentuk kembali dengan mengikuti perkembangan regional dan global. Rusia menyadari bahwa eksistensi Assad memiliki nilai penting bagi kepentingan Rusia. Terancamnya posisi Assad maka akan membahayakan kepentingan strategis Rusia, khususnya yang menyangkut dengan geopolitik. Suriah di bawah rezim Assad dapat menjadi benteng terakhir Rusia dalam memperluas pengaruhnya di kawasan. Dengan menjadi aktor kunci di Suriah, harapannya adalah dapat mempertahankan posisinya untuk memperoleh keuntungan strategis (Oligie, 2019).

Komitmen untuk mempertahankan Assad tidak dilakukan Rusia dengan mudah. Dalam praktiknya Rusia kerap mengalami kesulitan tatkala harus menemukan kesepakatan terkait solusi damai dengan pihak-pihak berseberangan. Baik bantuan diplomatik maupun bantuan militer belum mampu menghentikan progres dari pihak oposisi untuk menjatuhkan Assad. Sehingga Rusia dihadapkan pada kenyataan kritis terhadap posisi Assad di Suriah. Operasi militer langsung di Suriah pada awalnya bukanlah bagian dari kebijakan yang ingin diambil Rusia. Hal ini mengingat biayanya yang cukup besar dan bayang-bayang kegagalan Uni Soviet di Afghanistan masih menjadi momok yang mengkhawatirkan. Oleh karena itu upaya mempertahankan komitmennya terhadap rezim Assad telah memaksa Rusia untuk melakukan operasi militer langsung di Suriah (Charap et al., 2019).

3. Aturan Yang Dijalankan Rusia Dalam Konflik Suriah

Sebagai satu-satunya negara yang memiliki hubungan tradisional dengan Rusia, Suriah telah menjadi bagian dari kebijakan luar negeri Rusia. Rusia memiliki komitmen kuat terkait dukungannya terhadap Assad. Oleh karena itu dalam rangka mendukung komitmen tersebut, Rusia memberlakukan aturan main dengan inisiasinya sendiri. Hal tersebut dilakukan untuk mendukung komitmennya dalam mempertahankan posisi Assad. Secara umum terdapat empat aturan main yang diberlakukan Rusia dalam keterlibatannya terhadap konflik Suriah.

Pertama, Rusia berupaya untuk mewujudkan konsep *Responsibility To Protect* (R2P) dengan syarat 2 pilar utama yaitu, penekanan Rusia terhadap prinsip kedaulatan. Rusia menjunjung tinggi prinsip kedaulatan dengan memperkuat stabilitas pemerintah yang sah dan mengenyampingkan upaya melemahkan negara. Selanjutnya upaya bersama harus difokuskan terhadap strategi dalam menuntaskan akar penyebab konflik dibandingkan dengan reaksi terhadap pecahnya konflik. Rusia menegaskan bahwa seharusnya semua pihak memfasilitasi pertikaian dengan pondasi perdamaian yang kondusif sesuai kebutuhan domestik (Averre & Davies, 2015).

Kedua, Rusia kerap mencegah berbagai upaya yang berpotensi untuk melegitimasi perubahan rezim Assad dengan menggunakan kekuatan militer. Misalnya saja penggunaan veto terhadap draft resolusi DK PBB terhadap Suriah. Menurut Rusia, perubahan rezim tidak serta-merta dapat menyelesaikan permasalahan. Perubahan rezim

justru akan menjerumuskan Suriah kedalam eskalasi perang saudara yang lebih luas dan akan bertahan dalam waktu yang cukup lama. Sergey Lavrov dalam perdebatannya di PBB mengungkapkan bahwa situasi yang terjadi di Libya pasca jatuhnya Khadafi justru menjadi momentum pihak yang menjadi penguasa untuk melakukan intimidasi terhadap lawan politiknya (Averre & Davies, 2015).

Ketiga, Rusia berupaya untuk melemahkan basis-basis oposisi yang telah menguasai sebagian wilayah Suriah. Dalam operasi militer langsung di Suriah, Rusia kerap dikritik oleh pihak-pihak yang berseberangan. Hal tersebut dikarenakan Rusia tidak hanya menyerang kelompok ekstrimis namun juga kelompok oposisi dukungan asing. Menurut negara Barat, sebagian besar serangan Rusia justru menargetkan kelompok oposisi dibandingkan kelompok ekstrimis. Namun Rusia menganggap bahwa tindakan tersebut memiliki legalitas tinggi. Hal tersebut dikarenakan Rusia adalah negara yang diundang oleh pemerintah yang sah untuk mempertahankan dan merebut kembali setiap wilayah Suriah. (Mercier, 2016).

Keempat, menginisiasi forum perundingan yang hanya melibatkan Rusia bersama dua aktor regional lainnya seperti Turki dan Iran. Setelah mendapatkan momentum penting pasca operasi militernya di Suriah, Rusia mendorong kembali pihak-pihak yang bertikai ke meja perundingan. Menariknya perundingan yang diinisiasi oleh Rusia tidak melibatkan aktor-aktor global seperti Amerika Serikat dan Inggris. Namun Rusia hanya memasukkan dua aktor regional saja seperti Turki dan Iran. Sergey Lavrov menilai bahwa keterlibatan AS dan Inggris tidak akan memiliki pengaruh yang nyata terhadap situasi di Suriah (Fatmawati, 2020). Sebagaimana yang diketahui bahwa Deklarasi Moskow, Forum Astana hingga perundingan Sochi seluruhnya tidak melibatkan Amerika Serikat di dalamnya

4. Tindakan Rusia Terhadap Konflik Suriah

Kehadiran Rusia dalam konflik Suriah telah menjadikannya sebagai direct supporter terhadap rezim Assad. Dalam perjalanannya, Rusia telah mengambil seluruh tindakan yang diperlukan untuk terus mempertahankan rezim Assad pada posisinya. Secara umum Rusia telah mengambil tindakan dalam bentuk diplomasi dan militer sepanjang kehadirannya di Suriah. Dalam praktiknya sejak awal Rusia telah melakukan berbagai upaya diplomasi baik yang melibatkan internal Suriah sendiri maupun yang melibatkan aktor-aktor regional dan global. Konferensi Jenewa I dan II yang melibatkan Rusia bersama dengan Amerika Serikat, Inggris, Perancis dan beberapa aktor-aktor regional belum mampu menghasilkan kesepakatan apapun di atas meja. Kegagalan tersebut dipengaruhi oleh sejumlah faktor seperti perbedaan pandangan antara aktor-aktor yang terlibat, kegamangan tentang siapa yang akan menggantikan Assad hingga ketidakmampuan organisasi regional untuk menjadi mediator penting di kawasan (Cengiz, 2020).

Kegagalan upaya diplomasi yang dilakukan Rusia menyebabkan situasi semakin rumit. Situasi tersebut menempatkan Assad pada posisi yang sangat sulit. Bahkan sejumlah pengamat memprediksi bahwa eksistensi Assad sebagai presiden Suriah hanya menghitung hari. Sebagai sekutu Suriah, Iran telah memperingatkan Rusia untuk segera mengerahkan pasukan militernya di Suriah. Pada akhirnya melalui permintaan langsung serta dorongan dari Iran, Rusia segera mengerahkan kekuatan militernya untuk pertama kalinya di luar lingkungannya sendiri (Wójtowicz et al., 2019).

Menurut (Charap et al., 2019), tindakan militer Rusia dilatarbelakangi oleh lima faktor utama. *Pertama*, ancaman terorisme yang berpotensi mengganggu stabilitas regional dan global. Rusia melihat kelompok tersebut sebagai ancaman nyata layaknya separtisme Chechnya serta perang Uni Soviet-kelompok Mujahidin di masa lalu. Rusia khawatir akan kelompok-kelompok ekstrimis yang sebelumnya terisolasi di wilayah Rusia akan

terintegrasi kedalam jaringan teroris internasional dan menghubungkan mereka ke seluruh wilayah-wilayah bekas Uni Soviet. *Kedua*, perubahan rezim di Suriah merupakan ancaman terhadap lingkungan Rusia. Dukungan negara-negara Barat terhadap pemberontak memiliki konsekuensi besar terhadap eksistensi Rusia di kancah global. Rusia menilai bahwa Pergantian rezim yang tidak sejalan dengan Barat adalah upaya untuk memperlemah pengaruh Rusia. *Ketiga*, menghindari apa yang disebut sebagai “sekenario Libya”. Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya bahwa Rusia tidak akan membiarkan peristiwa yang terjadi di Libya terjadi di Suriah. Pergantian rezim di Libya telah mempengaruhi kepentingan Rusia di negara tersebut. *Keempat*, kebuntuan solusi diplomatik yang telah diupayakan Rusia sejak awal. Tidak ada kesepakatan apapun yang dihasilkan dari upaya diplomasi terkait solusi damai Suriah. *Kelima*, faktor militer merupakan faktor terbesar yang menjadi pertimbangan Rusia untuk menggunakan tindakan militer. (Allison, 2013), dalam tulisannya mengungkapkan bahwa sektor militer termasuk industri pertahanan memiliki bobot yang sangat signifikan dalam kebijakan luar negeri Rusia terhadap Suriah.

C. Tipe Peran Nasional Yang Dijalankan Rusia Dalam Konflik Di Suriah.

Tidak dapat dipungkiri bahwa hubungan historis Rusia-Suriah memiliki keberlanjutan pengaruh terhadap setiap keputusan yang diambil terhadap Suriah saat ini. Rusia enggan untuk memutuskan basis politik jangka panjang di Timteng. Bahkan saat situasi konflik mulai meluas, Rusia tetap memberikan dukungan intelejen yang berguna terhadap situasi konflik. Seorang analis Timteng Aleksei Malashenko mengungkapkan bahwa Suriah merupakan warisan yang tersisa dari hubungan Uni Soviet-Suriah di kawasan Timteng. Beranjak dari hal tersebut, sangat sulit bagi elit Rusia untuk menerima kenyataan yang terjadi di Suriah. Segala hal yang dipertaruhkan terhadap Suriah merupakan kepentingan strategis Rusia yang bahkan melebihi loyalitas bahkan identitas (Allison, 2013).

Menurut (Kreutz, 2010), Suriah mungkin lebih penting bagi Rusia jika dibandingkan dengan negara-negara Arab lainnya. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti, geopolitik dan ekonomi. Suriah terletak di Laut Mediterania yang menawarkan pijakan penting bagi Rusia di Timteng serta menjadi jantungnya dunia Arab. Tidak hanya itu pelabuhan-pelabuhan di Pantai Mediterania dapat memberikan akses terhadap kapal-kapal Rusia yang melakukan perjalanan melalui selat sempit yang dikendalikan Turki menuju Laut Hitam. Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah perdagangan persenjataan. Sebagai produsen peralatan militer, Rusia menjadi eksportir peralatan militer terbesar bagi Suriah. Hal tersebut mendorong Rusia untuk terus menjaga pengaruhnya terhadap Suriah. Meski hubungan kedua negara sempat jatuh kedalam titik terendah, namun perlahan hubungan keduanya mulai mengalami peningkatan seiring dengan perkembangan regional dan global (Kreutz, 2010).

Seiring menghangatnya hubungan kedua negara, kestiaan Rusia diuji tatkala Suriah harus mengalami ketidakstabilan internal yang berujung pecahnya perang saudara. Namun sebagai sekutu setia, Rusia tetap berkomitmen untuk mendukung pemerintahan Suriah dalam berbagai kondisi. Oleh karena itu dalam upayanya mencegah konflik melebar, Rusia berjuang keras di arena diplomatik untuk menghindarkan Assad dari ancaman pelengseran. Dalam praktiknya, Rusia kerap mengklaim bahwa kehadiran Rusia di samping rezim Assad bukan sebagai tameng, namun lebih kepada melindungi masyarakat Suriah secara umum. Klaim tersebut bukan tanpa alasan, Rusia menyadari bahwa untuk menjadi mediator konflik diperlukan netralitas dalam mendapatkan kepercayaan dari berbagai pihak.

Posisi Assad di Suriah merupakan hal terpenting bagi Rusia untuk dipertahankan. Sehingga klaim dalam melindungi Suriah secara umum hanya untuk menegaskan posisi

Rusia sebagai mediator netral. Sebagaimana yang diungkapkan oleh (Allison, 2013) bahwa terdapat dua pandangan utama Rusia terhadap rezim Assad. Pertama, Rusia mutlak tidak menghendaki adanya pergantian rezim. Kedua, Putin berupaya untuk menggambarkan citra baik Rusia sebagai sekutu yang teguh dan solid terhadap Suriah. Sebagaimana keberpihakan Rusia terhadap negara-negara CIS di Asia Tengah (Allison, 2013).

Sebagai sekutu, Rusia kerap menghendaki penyelesaian konflik dengan menggunakan strateginya sendiri. Bagi Rusia, solusi diplomatik harus dilakukan berdasarkan pada struktur dan institusi yang telah ada di Suriah. Oleh karena itu untuk mencapai hal tersebut, pembagian kekuasaan antara rezim berkuasa dengan elemen oposisi harus sesuai pilihannya. Namun hal tersebut mustahil untuk dicapai melalui langkah-langkah diplomatik. Sehingga Rusia memilih langkah militer untuk menemukan jalan keluar atas konflik yang berlarut-larut. Dengan kata lain strategi militer di Suriah bertujuan untuk menopang rezim Assad dalam waktu yang lama sembari mendapatkan formula untuk mencapai solusi diplomatik yang diinginkan Rusia (Bishara, 2015).

Operasi militer yang telah berjalan selama beberapa tahun terakhir, memaksa pihak oposisi untuk menyerahkan kembali wilayah yang telah dikuasai sebelumnya kepada pihak pemerintah Assad. Keberhasilan tersebut secara *de facto* membuat skenario Barat gagal di Suriah. Selain itu tindakan militer akan memungkinkan Rusia untuk mempromosikan kekuatan militernya ke berbagai negara di kawasan. Pasca beberapa tahun melakukan operasi militernya di Suriah, Rusia telah mendapatkan banyak permintaan terhadap peralatan militernya dari negara-negara Timteng termasuk negara-negara yang dekat dengan AS seperti Turki, Arab Saudi, Irak dan Qatar. Bahkan AS sendiri telah memperingkatkan sekutunya untuk tidak membeli peralatan militer Rusia (Mezran et al., 2019).

Hingga tahun 2020 tidak ada satupun dari upaya pelengseran Assad berhasil dilakukan. Rusia secara tegas akan terus menjaga agar rezim Assad tetap berkuasa. Dalam pandangan Rusia, hanya Assad yang mampu melawan kelompok teroris, mempertahankan institusi negara Suriah hingga menjamin eksistensi militer Rusia di Suriah, khususnya di Pelabuhan Tartus. Meski imbalan atas pertaruhannya tidak sebesar yang ada di Ukraina, namun Rusia melirik keuntungan jangka panjang di Suriah, termasuk mendirikan benteng di kawasan. Oleh karena itu kemenangan Assad mutlak untuk diupayakan. Hal tersebut pula yang kemudian menjadi alasan Rusia secara paralel memobilisasi militer bersamaan dengan upaya diplomatik di Suriah (Askerov & Tchantouridze, 2021).

Berbagai pencapaian yang telah diraih Rusia dalam keterlibatannya di Suriah merupakan rentetan dari serangkaian keputusan, komitmen, aturan, dan tindakannya dalam mendukung serta mempertahankan rezim Assad. Pencapaian tersebut tampaknya telah memulihkan kembali posisinya di Timteng yang telah hilang beberapa dekade pasca runtuhnya Uni Soviet. Meski begitu, serangkaian keputusan, komitmen, aturan, dan tindakan yang dibuat Rusia tidak selalu dapat mengakomodasi keinginan Assad. Rusia kerap kesulitan dalam bertindak, hal ini dipicu oleh keterlibatan aktor-aktor lain di Suriah. Misalnya saja keterlibatan Turki di wilayah Idlib, Al-Bab dan Efrin berpotensi mencegah tentara Suriah untuk merebut kembali wilayah-wilayah yang dikuasai oleh oposisi dukungan Turki. Di satu sisi Turki merupakan mitra dagang potensial bagi Rusia, sehingga perlu diambil keputusan yang tidak populer, meski berdampak terhadap rezim Assad. Namun di sisi lainnya Rusia tetap memberikan dukungan terhadap rezim Assad dalam upaya merebut kembali wilayah-wilayah yang dikuasai oposisi. Pada akhirnya, Rusia membuat keputusan untuk mengakomodasi kepentingan kedua pihak melalui perundingan dalam forum-forum yang melibatkan Rusia, Turki dan Iran (Lund, 2019).

Konflik kepentingan kerap mewarnai keputusan Rusia di Suriah. Namun kendati demikian, hal tersebut dilakukan agar tidak menimbulkan konfrontasi langsung dengan pihak-pihak terlibat. Rusia tetap ingin menjalin hubungan baik dengan aktor-aktor pro oposisi meski hal tersebut kemungkinan akan menghambat kemajuan tentara Suriah dalam merebut kembali wilayah Suriah (Lund, 2019). Sebagaimana yang telah diungkapkan Holsti bahwa terdapat situasi dimana konsepsi peran nasional tidak dapat diprediksi atau justru menjadi bertentangan dengan konsepsi itu sendiri. Hal tersebut dikarenakan adanya faktor tertentu seperti faktor ekonomi, kebutuhan domestik, sikap-sikap umum dan kondisi eksternal (Holsti, 1987). Dalam konflik Suriah, sebagai sekutu, Rusia tidak serta-merta dapat memuaskan rezim Assad secara mutlak. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga hubungan baik serta menghindari konfrontasi langsung dengan mitra potensialnya. Dalam hal ini Rusia mempertimbangkan faktor ekonomi terkait hubungannya dengan Turki.

5. KESIMPULAN

Ketika konflik mulai pecah, Rusia telah memutuskan untuk berada di sisi Assad dalam mencari solusi penyelesaiannya. Sebagai sekutu setia, Rusia telah berjuang di arena diplomatik yang melibatkan berbagai aktor-aktor regional dan global. Meski begitu, tidak ada kesepakatan berarti terhadap situasi Suriah. Pada akhirnya Rusia memutuskan untuk menggunakan langkah militer dalam rangka mendapatkan kembali kontrol atas sebagian wilayah Suriah yang telah direbut oleh pihak oposisi. Keberhasilan tindakan militer, meningkatkan popularitas serta profil Rusia sebagai aktor dominan di Suriah. Memanfaatkan situasi tersebut, Rusia kemudian menghidupkan kembali perundingan damai atas inisiasinya sendiri. Serangkaian keputusan, komitmen, aturan, dan tindakan yang dibuat oleh Rusia dalam keterlibatannya di Suriah, telah berhasil menghindarkan Assad dari ancaman pengalihan. Bagi Rusia, kerugian dalam mempertahankan Assad jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan kehilangan Assad dari Suriah. Oleh karena itu sebagai sekutu setia Rusia akan menempuh berbagai hal termasuk sesuatu yang tidak populer untuk dilakukan dalam mempertahankan posisi Assad di Suriah.

DAFTAR PUSTAKA

- Allison, R. (2013). Russia and Syria: Explaining alignment with a regime in crisis. *International Affairs*, 89(4), 795-823. <https://doi.org/10.1111/1468-2346.12046>
- Askerov, A., & Tchantouridze, L. (2021). Threat and Cooperation: Syria in Russo-Turkish Relations. *Contemporary Turkish - Russian Relations From Past to Future*, 137-156. <https://doi.org/10.26650/b/ss52.2021.011.07>
- Averre, D., & Davies, L. (2015). Russia, humanitarian intervention and the Responsibility to Protect: The case of Syria. *International Affairs*, 91(4), 813-834. <https://doi.org/10.1111/1468-2346.12343>
- Bagdonas, A. (2012). Russia ' s Interests in the Syrian Conflict: *European Journal of Economic and Political Studies*, July(July 2012), 55-77.
- Bartz, L. (2016). *Russian-Syrian Relations: Past and Present*. 6(6).
- Bishara, A. (2015). *Russian intervention in Syria: Geostrategy is paramount*. https://www.dohainstitute.org/en/ResearchAndStudies/Pages/Russian_Intervention_in_Syria_Geostrategy_is_Paramount.aspx
- Cengiz, S. (2020). Assessing the Astana Peace Process for Syria: Actors, Approaches, and Differences. *Contemporary Review of the Middle East*, 7(2), 200-214. <https://doi.org/10.1177/2347798920901876>
- Charap, S., Treyger, E., & Geist, E. (2019). Understanding Russia's Intervention in Syria. *RAND Corporation*. <https://doi.org/https://doi.org/10.7249/RR3180>
- Fatmawati. (2020). Perubahan Politik Luar Negeri Rusia Terhadap Suriah Dalam Konflik Internal Suriah (2011 - 2017). *Jdp (Jurnal Dinamika Pemerintahan)*, 3(1), 23-41. <https://doi.org/10.36341/jdp.v3i1.1192>
- Hamilton, R. E., Miller, C., Stein, A., Borshchevskaya, A., Kofman, M., Grau, L., Bartles, C., Lavrov, A., & Delanoë, I. (2020). *Russia's War in Syria: Assessing Russian Military Capabilities and Lessons Learned* (R. E. Hamilton, C. Miller, & A. Stein (eds.)). Foreign Policy Research Institute.
- Holsti, K. J. (1970). National Role Conceptions in the Study of Foreign Policy. *International Studies Quarterly*, 14(3), 233. <https://doi.org/10.2307/3013584>
- Holsti, K. J. (1987). *Politik Internasional: Kerangka Analisa/K.J. Holsti; kata pengantar Juwono Sudarsono* (J. Sudarsono (trans.)). Pedoman Ilmu Jaya.
- Issaev, L. (2018). *What is After Russia's Military Withdrawal From Syria?* AlJazeera Center For Studies. <https://studies.aljazeera.net/en/reports/2018/02/russia-military-withdrawal-syria-180205061719003.html>
- Kreutz, A. (2010). Syria: Russia ' s Best Asset in the Middle East. *Syria*, November, 23. <https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/kreuzengrussiasyrianov2010.pdf%0A>
- Kuimova, A. (2019). *Russia's Arms Exports to the MENA Region: Trends and Drivers*. 95, 1-15.
- Lund, A. (2019). From Cold War to Civil War: 75 Years of Russian-Syrian Relations. *Swedish Institute of International Affairs (UI)*, 1-60. <https://www.ui.se/globalassets/ui.se-eng/publications/ui-publications/2019/ui-paper-no.-7-2019.pdf>
- Mercier, S. (2016). *The Legality of Russian Airstrikes in Syria and "Intervention by Invitation."* E-International Relations. <https://www.e-ir.info/2016/04/29/the-legality-of-russian-airstrikes-in-syria-and-intervention-by-invitation/>
- Mezran, K., Varvelli, A., & (eds.). (2019). *The MENA Region: A Great Power Competition* (K. Mezran & A. Varvelli (eds.)). Ledizioni LediPublishing, Milano. <https://doi.org/https://doi.org/10.14672/55260718>.
- Notte, H. (2020). The United States, Russia, and Syria's chemical weapons: a tale of cooperation and its unravelling. *Nonproliferation Review*, 27(1-3), 201-224. <https://doi.org/10.1080/10736700.2020.1766226>
- Oligie, C. (2019). Why Russia is Involved in the Syrian Civil War: One Issue, Many Views. *Acta Universitatis Danubius. Relationes Internationales*, 12(1), 93-136.
- Pillon, M. (2014). *The Syrian Conflict "Conflict Analysis Of A Multi-Layered Civil War."* 1-66. www.academia.edu/211304521/2FThe_Syrian_Conflict_Conflict_Analysis_of_a_Multi-Layered_Civil_War&usg=AFQjCNHuxImEvE25ObEI0a2_pyC23-ilyA&bvm=bv.122448493,bs.1,d.bGg

- Şen, A. H. (2020). *Russian-Syrian relations since the Arab spring: a strong alliance* [Thesis (M.S.) -- Graduate School of Social Sciences.Middle East Technical University]. <https://open.metu.edu.tr/handle/11511/45433>
- Wish, N. B. (1980). Foreign Policy Makers and Their National Role Conceptions. *International Studies Quarterly*, 24(4), 532. <https://doi.org/10.2307/2600291>
- Wójtowicz, T., Barsznica, I., & Drag, K. (2019). the Influence of Russian Military Involvement in the War in Syria. *Zeszyty Naukowe Akademii Sztuki Wojennej*, 111(2), 85-99. <https://doi.org/10.5604/01.3001.0012.8529>